

DAMPAK LIBERALISASI PERDAGANGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU PERDAGANGAN BERAS DI INDONESIA

(The Effect of Trade Liberalization towards Welfare of Participants of Rice Trade in Indonesia)

Yuli Hariyati

Fakultas Pertanian - Universitas Jember

ABSTRACT

This- research aims to asses the effect of trade liberalization towards the welfare of the economy's participants of rice. The results of the research indicates: (1) Implementation of one-side liberalization conducted by Indonesia that was not followed by the other countries has better off the welfare of consumer and worsened off the welfare of rice producers. (2) The law of one price policy as the consequences of trade liberalization has brought about a positive impact on rice economy. It creates positive changes of net economic surplus for rice economy.

Key words : Trade liberalization, rice, surplus

PENDAHULUAN

Didorong beras dan gula masih merupakan komoditas strategis yang fluktuasi harganya berdampak pada stabilitas nasional, oleh karenanya komoditas tersebut masih memerlukan kebijakan/intervensi pemerintah. Intervensi yang sangat kuat mencakup sektor produksi, pemasaran dan perdagangan, penetapan harga dan kebijakan pemenuhannya. Intervensi pemerintah menyebabkan terjadinya distorsi di pasar gula ataupun beras bahkan distorsi yang ditimbulkan bisa bersifat timbal balik yaitu perubahan intervensi pada komoditas gula berdampak pada perekonomian beras begitu juga sebaliknya.

Di negara berkembang intervensi pemerintah cenderung memihak kepada konsumen dengan menerapkan pajak produsen di sektor pertanian. Kebijakan harga murah telah menimbulkan sektor pertanian bersifat gurem dan tradisional. Beberapa negara menerapkan kebijaksanaan subsidi input produksi sebagai kompensasi yang diberikan kepada petani, tetapi pada akhirnya menghadapi masalah membengkaknya anggaran pemerintah yang harus dikeluarkan untuk subsidi. Kondisi sebaliknya terjadi di negara maju, di mana intervensi pemerintah umumnya lebih menguntungkan produsen pertanian. Subsidi produksi, subsidi ekspor serta subsidi langsung dalam bentuk pembayaran kompensasi dan defisiensi merupakan instrumen kebijaksanaan yang umum diterapkan di negara maju, terutama di Eropa maupun USA. Akibatnya terjadi surplus produksi untuk beberapa komoditas pertanian yang pada gilirannya dipasok di pasaran dunia dengan mekanisme subsidi ekspor (Erwidodo, dkk. 1996; Ratnawati, 1996).

Liberalisasi perdagangan menyebabkan surplus pangan di sejumlah negara, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada dan Australia. Surplus tersebut dilempar ke pasar dunia, sehingga sejak tahun 1995 harga pangan merosot tajam. Indonesia, negara berpenduduk terbanyak nomor empat menjadi sasaran produk pangan negara maju (Sadoulet, dan Janvry, 1992; Stepenson, dan Erwidodo, 1995). Sampai saat ini Indonesia negara pengimpor beras terbesar dunia dan gula pada urutan kedua.

Pertanyaan yang sering muncul dalam proses globalisasi adalah mengenai prospek dan peranan negara berkembang seperti Indonesia dalam proses internasionalisasi dan globalisasi yang sedang berjalan. Bagaimanakah nasib negara berkembang dalam proses yang semakin mengglobal dan interdependen tersebut, dengan kegiatan ekonomi yang semakin *borderless* dimana satuan-satuan usaha, dan negara maju semakin menghendaki keterbukaan pasar dan kesempatan usaha diseluruh dunia. Interdependensi antar negara dan antar masyarakat di dunia akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang, dan hal ini akan banyak menunjang laju pertumbuhan perekonomian dunia. Akan tetapi adanya interdependensi dan laju pertumbuhan yang tinggi tidak otomatis dapat menyelamatkan negara berkembang tanpa suatu strategi yang jelas dan tanpa perumusan mengenai apa yang dikehendaki oleh negara berkembang. Proses tersebut mengan-dung resiko maupun pejuang. Bagi negara sedang berkembang, proses interdependensi global yang semakin meluas tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan pejuang yang ada dan mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan (Anderson, and Tyers, 1990; Khudori, 2001).

Perjanjian-perjanjian perdagangan internasional di era liberalisasi perdagangan yang mempengaruhi kebijakan nasional pembangunan pertanian di Indonesia antara lain berupa isu -nengenai liberalisasi perdagangan hasil-hasil pertanian sesuai negosiasi perdagangan multilateral Putaran Uruguay September 1986. Perjanjian perdagangan hasil pertanian yang disempurnakan dalam sidang Trade negotiation (TNC) di Senewa Desember 1993, yang hasil rumusannya antara lain untuk meningkatkan akses pasar internasional; maka mulai tahun 1995, diberlakukan bahwa: (a) semua bentuk rintangan perdagangan non tarif harus dilakukan melalui tarif, (b) pengurangan tarif berangsur-angsur sebesar 36% bagi negara maju dan sebesar 24% untuk negara berkembang, (c) kesempatan akses hanya diperbolehkan melalui tarif kuota sebesar 3% dari total konsumsi. Implementasi liberalisasi perdagangan ini terus berkembang, yang pelaksanaannya

sempurna pada tahun 2003 untuk negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, melalui kesepakatan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), dan pada tahun 2005 untuk negara-negara kawasan Asia Pasifik melalui kesepakatan APEC (*Asia Pasific Economic Community*) dan tahun 2020 di seluruh dunia melalui kesepakatan WTO (Tanner, 1996; Kartadjuma, 2000; Irewati, 1996; Levy, 1997).

Liberalisasi perdagangan diakui membawa beberapa manfaat, antara lain harga pangan yang relatif murah, mekanisme pasar pangan dalam negeri yang semakin sehat dan beban anggaran pemerintah yang semakin ringan untuk menjamin kebutuhan pangan nasional. Para konsumen jelas sangat diuntungkan oleh kebijakan ini, sementara kerugian diderita petani. Dalam jangka panjang ketergantungan semakin tinggi terhadap pasokan pangan dari impor dan kerugian petani akan semakin berkepanjangan. Ada tiga kekhawatiran atas langkah liberalisasi perdagangan pangan (termasuk beras dan gula) tersebut: (a) Indonesia akan semakin tergantung pada pasokan pangan dari impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, karena kecenderungan harga pangan yang semakin menurun, (b) basis produksi pangan dalam negeri akan semakin keropos, karena petani enggan menanam padi atau pangan lainnya karena tidak ada jaminan harga, dan (c) meluasnya keresahan petani karena kegagalan pemerintah mengatasi gejolak harga padi (Pelitasari, 2000; Deptan RI, 2000; Amang, 2000; Simatupang, 1999).

Mendasarkan pada latar belakang tersebut menarik kiranya dilakukan penelitian yang mengkaji *bagaimana dampak liberalisasi perdagangan yang memberlakukan perdagangan bebas berpengaruh pada surplus produsen serta konsumen?*

Dampak liberalisasi perdagangan diukur melalui perubahan kesejahteraan pelaku ekonomi yaitu perubahan kesejahteraan produsen, konsumen, lembaga pemasaran serta pemerintah yang dalam hal ini menggambarkan keragaan perdagangan beras.

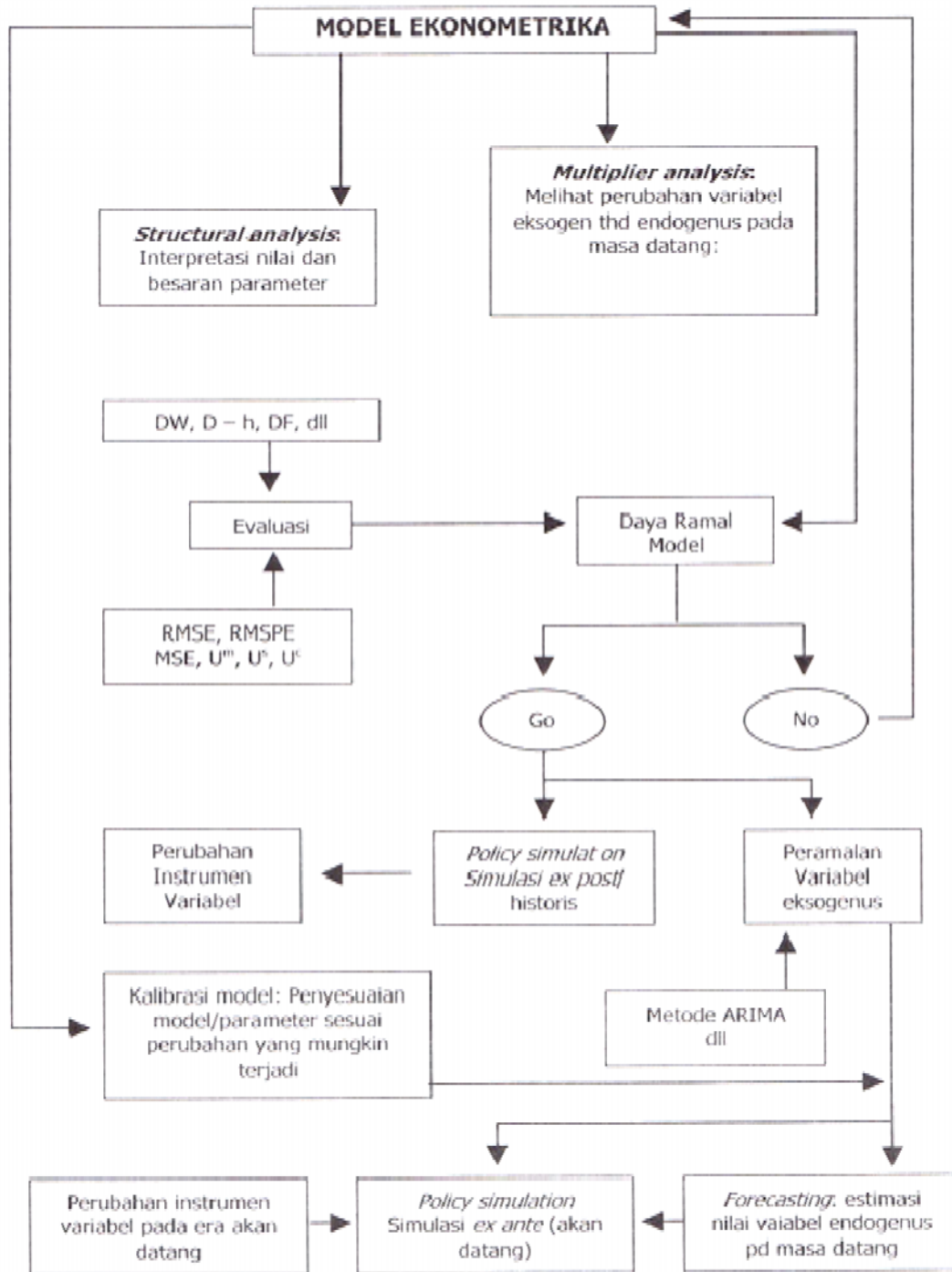
METODE

Tahapan analisis data penelitian disajikan pada skema Gambar 1, dengan hasil analisis berupa hubungan antar variabel perdagangan beras disajikan pada Gambar 2.

Kajian Historis Kebijakan Pemerintah. Sejarah telah mengajar akan pentingnya penataan kebijakan pangan utamanya beras dan gula, dimana keduanya merupakan komoditas strategis. Strategisnya kedua komoditas selain ditunjukkan pangsa pengeluaran yang cukup tinggi untuk beras sebesar 20,02% dan gula sebesar 2.61% (Susenas, 1990) juga ditunjukkan adanya potensi masalah yang cukup besar jika terjadi defisit antara produksi dan kebutuhan kedua komoditas tersebut.

Historis kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pangan utamanya beras sebagai berikut:

1. Perubahan harga dunia mudah ditransmisi ke dalam negeri, salah satunya melalui variabel kurs yang sampai saat ini masih berfluktuasi. Simulasi peramalan perubahan nilai tukar yang naik 50% (depresiasi rupiah) menunjukkan kenaikan harga impor beras, masing-masing meningkat sebesar 0.07% dan 3.20%. Kenaikan harga impor tersebut akan menurunkan impor dan meningkatkan harga domestik. Kondisi ini berdampak menurunkan net surplus pelaku ekonomi beras. Mengingat pula Indonesia saat ini masih rapuh, setelah tahun 1998 ditimpa krisis yang berkepanjangan hingga menjadi krisis multi dimensi, maka dirasakan masih perlu adanya campurtangan pemerintah.
2. Kebijakan perberasan, yaitu pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan 568/KMK.01/1999 tanggal 31 desember 1999, dimana untuk beras impor dikenakan tarif Rp. 430,-/Kg, dilanjutkan Inpres No. 8 Tahun 2000 ditandai kegagalan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya dilengkapi kebijakan pendukung di bidang pembiayaan dan mekanisme pembelian serta lemahnya pemihakan pemerintah kepada petani mengakibatkan seringnya terjadi harga gabah petani dibawah harga dasar (Arifin, 2001). Data menunjukkan di tahun 1997 (awal krisis) kurang dari 1% petani yang menerima harga dibawah harga dasar, tahun 1998 (puncak krisis) menjadi 3,77%, tahun 1999 naik menjadi 8.29% dan di tahun 2000 meningkat lagi menjadi 49.70%. Pemerintah menganggap bahwa dalam kondisi pasar bebas, untuk komoditas beras serta keterbatasan dana dan sumberdaya pemerintah, maka kebijakan Harga dasar gabah (HDG) tidak efektif lagi dan digantikan dengan kebijakan Harga Dasar Pembelian (HDP) pemerintah yang diistilahkan sebagai *Procurement Price Policy*. Disamping itu masalah krusial yang selalu terjadi setiap tahun yaitu gejolak harga antar musim.



Gambar 1: Tahapan Analisis Data Penelitian

Pada musim panen raya (Februari -Maret) sekitar 60 - 65% produksi nasional dengan mekanisme pasar akan memperoleh harga yang rendah dan merugikan petani. Sebaliknya pada musim paceklik (Oktober - Januari) harga akan melonjak dan merugikan konsumen. Dampak negatif seperti ini perlu diatasi melalui kebijaksanaan harga (Nainggolan, 2001). Dalam hal untuk mempertahankan kebijaksanaan harga dasar, pemerintah masih dapat menugasi Bulog, karena hal ini tampaknya untuk sementara waktu masih sulit dilakukan, baik oleh swasta maupun oleh koperasi. Dengan paradigma baru tugas dan fungsi Bulog diantaranya mendinamisir pasar beras melalui pembelian pada waktu panen dengan ketentuan harga dasar pembelian pemerintah, menyalurkan beras untuk operasi pasar, mengadakan beras untuk stok dan berposisi secara kompetitif dengan importir umum dalam mencukupi kebutuhan beras. Dalam pengadaan beras untuk cadangan atau stok telah dilakukan analisa simulasi peramalan terhadap pelepasan pengendalian tataniaga beras oleh Bulog. Hasil simulasi peramalan menunjukkan bahwa dengan membebaskan pasar beras mengikuti mekanisme pasar bebas tanpa pengendalian stok berarti tidak ada lagi sebagian beras yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan tahun yang akan datang. Tidak dicadangkannya beras untuk tahun berikutnya (stok akhir tahun nol) berarti beras yang ditawarkan meningkat yang berdampak menurunnya harga eceran beras. Dari analisis penurunan harga sebesar 3.178% berdampak penurunan minat petani menanam padi yang pada akhirnya menurunkan produksi gabah dan penawaran beras. Pelepasan tataniaga beras oleh Bulog ternyata menguntungkan konsumen sebaliknya menurunkan surplus, produsen dan penerimaan pemerintah. Nampak bahwa apabila kebijakan bertujuan untuk menyehatkan petani (produsen) maka pelepasan pengendalian tataniaga beras oleh Bulog secara penuh tidaklah merupakan salah satu pilihan yang bijaksana.

3. Pemerintah Indonesia telah memilih satu kebijakan pangan (beras) yaitu kebijakan yang disitilahkan sebagai "kecenderungan pada swasembada" (*on trend self-sufficiency*) yaitu swasembada yang tidak harus berarti tanpa impor, melainkan impor dapat dilakukan bila dalam keadaan defisit, sebaliknya ekspor dilakukan dalam keadaan surplus. Pilihan lainnya adalah swasembada absolut dan kebijakan mendorong keleuasaan petani menanam komoditi yang menguntungkan sementara pangan dicukupi melalui impor. Kelemahan kebijakan swasembada absolut adalah kurang realistis dimana dalam era yang semakin mengglobal suatu negara tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain yang kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Alasan tidak dipakainya kebijakan menggantungkan pada impor adalah adanya resiko yang tinggi apabila sepenuhnya

menggantungkan pada pasar internasional, dimana beras yang diperdagangkan sangat kecil yaitu sekitar 7% dari total produksi dunia.

4. Liberalisasi perdagangan untuk produk pertanian bukan berarti penghapusan sama sekali intervensi pemerintah. Dua hal yang penting kesepakatan GATT/WTO dalam peningkatan akses pasar aproduk pertanian yaitu: 1. Konversi restriksi impor non tarif menjadi ekuivalen tarif (tarifikasi), dan 2. Penurunan tarif 36% dalam 6 tahun untuk negara maju dan 24% selama 10 tahun untuk negara berkembang. Dalam AFTA, Indonesia memasukkan beras sebagai produk *highly sensitive*, yang berarti penurunan tarif bias lebih dari 10 tahun dan tingkat tarif bias lebih tinggi dari 5%. Untuk beras (produk *highly sensitive*) penurunan tarif dimulai tahun 2001 dengan fleksibilitas dan tidak melewati tahun 2003, diharapkan berakhir 2010 dengan fleksibilitas. Jurnal Pasar Modal Indonesia (2000) menyatakan bahwa dengan mulai stabilnya nilai tukar rupiah dan harga beras dunia telah lebih murah sehingga cukup beralasan jika bea masuk impor kembali diterapkan guna membatasi beras impor. Ini kelihatannya telah ditanggapi positif oleh pemerintah, yang bersama-sama dengan *International Monetary Fund* (IMF) menyetujui pengenaan bea masuk beras menjadi 30%, dan akan ditinjau setiap enam bulan. Mendasarkan pada beberapa persetujuan perdagangan internasional maka alternatif kebijakan untuk komoditas beras sebaiknya tidak menghilangkan tarif impor sampai nol persen, tetapi lebih sesuai mengikuti beberapa aturan yang telah ditetapkan.

Liberalisasi perdagangan diharapkan akan membentuk stabilitas pasar, akan tetapi campur tangan pemerintah dalam situasi kegagalan pasar (*market failure*) masih diperlukan. Di beberapa negara, ekonomi pangan seperti beras masih mengandung intervensi pemerintah. Sebagai contoh, Malaysia dengan Bernas, Philipina dengan NFA (*National Food Authority*), Jepang dengan memberlakukan bea masuk 351 yen/kg, demikian pula India, Vietnam dan Thailand (Nainggolan, 2001; Amang dan Sawit, 1999). Tampaknya masih ada kesadaran yang kuat bahwa pangan terlalu beresiko apabila diserahkan kepada mekanisme pasar. Bagi Indonesia apabila menerapkan kebijakan penghapusan tarif untuk beras sampai nol persen adalah menyulitkan. Hal ini akan memungkinkan justru Indonesia akan menjadi target pasar bagi negara-negara maju. Hal ini dikarenakan negara maju telah menetapkan *initial tariff rate* sangat tinggi. Sebagai contoh tarif awal di USA untuk gula sebesar 244%, Jepang untuk beras 351 yen/kg, EU untuk gandum 168%, dan negara-negara tersebut hanya menurunkan maksimum 36% dari tingkat tersebut dalam kurun waktu 6 tahun sampai tahun 2000. Sekali lagi solusi alternatif kebijakan di Indonesia di era liberalisasi perdagangan adalah tetap memberlakukan bea masuk seperti beras sebesar Rp. 650/kg. Beberapa aturan lain seperti AFTA, Indonesia mengusulkan *ending rate* bea masuk 20% tahun 2010 dan persetujuan IMF bea

masuk beras menjadi 30%.

PERAMALAN DAMPAK LIBERALISASI PERDAGANGAN Simulasi 1: Penerapan Liberalisasi Beras di Indonesia

Penerapan liberalisasi beras sepihak di Indonesia berarti penghapusan tarif impor serta penghapusan tataniaga beras oleh Bulog. Pengaruh penghapusan intervensi harga beras (tarif impor) mengakibatkan penurunan harga beras domestik yang selanjutnya meningkatkan permintaan beras. Disamping itu, penghapusan tarif impor menggambarkan kesamaan harga dunia dengan harga impor yang berakibat menurunkan impor beras. Penghapusan pengendalian tataniaga beras oleh Bulog, berarti tidak ada lagi pengendalian stok akhir tahun. Penghapusan pengendalian tataniaga beras yang dilakukan dengan penghapusan stok (stok akhir tahun = 0) akan mempengaruhi ketersediaan beras tahun berikutnya atau stok awal tahun berikutnya, yang akan berpengaruh penurunan penawaran beras.

Penghapusan tarif impor selain berdampak menurunkan harga beras domestik sekaligus meningkatkan permintaan beras dan menurunkan produksi (dikarenakan petani lebih memilih menanam tanaman selain padi, misalnya tebu).

Menurunnya produksi dalam negeri meningkatkan impor beras. Dampak penghapusan intervensi harga beras domestik maupun pengendalian tataniaga beras berarti Indonesia menerapkan liberalisasi perdagangan Deras sedangkan negara lain tidak. Simulasi peramalan menunjukkan bahwa remberlakukan liberalisasi beras di Indonesia berdampak meningkatkan surplus konsumen (sebesar 2716579.9), penurunan surplus produsen (sebesar -435325.71), peningkatan surplus lembaga pemasaran (sebesar 172574.9) serta penurunan penerimaan pemerintah (sebesar 1529756.9). Secara keseluruhan simulasi perhalan liberalisasi beras tanpa pengendalian tataniaga di Indonesia berdampak meningkatkan total surplus pelaku ekonomi.

Penurunan harga beras domestik mengurangi minat petani menanam padi akibatnya mereka mengalihkan fungsi lahannya untuk ditanamai tebu. Akibatnya produksi meningkat sehingga menurunkan impor gula. Dampak keseluruhan adalah penurunan surplus konsumen, peningkatan surplus produsen, peningkatan surplus lembaga pemasaran dan meningkatnya penerimaan pemerintah. Perubahan beberapa variabel ekonomi sebagai dampak simulasi ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dampak Simulasi Peramalan Liberalisasi Perdagangan Beras di Indonesia

Variable	Satuan	Mean	lib-rc-l		Perubahan	
		Dasar	Simulasi 1	Unit	%	
Beras						
Produksi gabah di Jawa	(000 ton)	41066	40995	-71.000	-0.173	
Produksi Gabah di Luar Jawa	(000 ton)	18041	17937	-104.000	-0.576	
Produksi Gabah Nasional	(000 ton)	59106	58932	-174.000	-0.294	
Produksi Beras Nasional	(000 ton)	35600	35495	-105.000	-0.295	
SUSUT	(000 ton)	3204	3195	-9.000	-0.281	
Penawaran Beras Indonesia	(000 ton)	44694	41609	-3085.000	-6.902	
Harga Gabah di Jawa	(Rp/kg)	477.39	470.52	-6.870	-1.439	
Harga Gabah di Luar Jawa	(Rp/kg)	476.11	467.58	-8.530	-1.792	
Harga Gabah di Nasional	(Rp/kg)	571.91	562.63	-9.280	-1.623	
Harga Beras Domestik (eceran)	(Rp/kg)	1178.22	1106.87	-71.350	-6.056	
Marjin Pemasaran Beras	(Rp/kg)	228.68	172.74	-55.940	-24.462	
Pemiantaan Beras di Indonesia	(000 ton)	37913	38235	322.000	0.849	
Harga Impor Beras di Indonesia	(US\$/kg)	0.42155	0.52975	0.108	25.667	
PIMBII	(Rp/kg)	803.24	1009.40906	206.169	25.667	
Impor Beras Indonesia	(000 ton)	9363	9376	13.000	0.139	
Impor Beras Dunia	(000 ton)	37908	37921	13.000	0.034	
Ekspor Beras Dunia	(000 ton)	29838	29845	7.000	0.023	
Harga Beras Dunia	(US\$/kg)	0.52919	0.52975	0.001	0.106	
Konsumen Beras	(000 Rp)		2716579.9			
Produsen Jawa	(000 Rp)		-281879.54			
Produsen Luar Jawa	(000 Rp)		-153446.17			
Total Produsen Padi	(000 Rp)		-435325.71			
Lembaga Pemasaran	(000 Rp)		172574.9			
Penerimaan Pemerintah	(000 Rp)		-1529756.9			
Total Surplus Beras	(000 Rp)		924072.229			

Simulasi 2: Penerapan Liberalisasi Beras di Semua Negara

Penghapusan intervensi harga beras di semua negara berarti penerapan liberalisasi beras di semua negara yang ditandai adanya pemberlakukan hukum satu harga yaitu harga dunia. Dalam kondisi ini Indonesia memberlakukan penghapusan tarif impor serta penghapusan

pengendalian tataniaga bera (stok=0). Perubahan yang mungkin terjadi akibat adanya simulasi peramalan ini adalah naik atau turunnya harga dunia sesuai dengan perubahan ekspor atau impor beras dunia.

Indonesia merespon kebijakan ini dengan meningkatkan impor dan turunnya harga domestik. Turunnya harga berakibat turunnya

luas areal, produksi gabah dan beras serta meningkatkan permintaan. Peningkatan impor mengakibatkan Indonesia menambah impor dunia. Perubahan intervensi telah mengakibatkan besarnya respon negara eksportir, sehingga perubahan ekspor dunia lebih besar daripada impor dunia yang berakibat penurunan harga dunia. Turunnya harga dunia mendorong penurunan harga impor dan harga beras di Indonesia.

Perubahan-perubahan yang terjadi diantaranya adalah penurunan harga duni disebabkan perubahan yang relatif besar pada ekspor beras dunia (4.062%) dari pada impor beras dunia (0.113%). Penurunan harga beras dunia menyebabkan harga impor beras di Indonesia

menurun yang berakibat pada kenaikan impor beras. Selain itu penurunan harga impor mengakibatkan penurunan harga beras dan harga gabah dalam negeri, yang berdampak pada penurunan produksi. Penghapusan stok beras dalam negeri mengakibatkan menurunnya penawaran. Dampak penerapan liberalisasi beras di dunia bagi pelaku ekonomi perberasan di Indonesia adalah berdampak positif terhadap total surplus pelaku ekonomi perdagangan beras. Total surplus meningkat beras ditandai dengan peningkatan surplus konsumen, penurunan surplus produsen, peningkatan surplus lembaga pemasaran dan peningkatan penerimaan pemerintah. Simulasi peramalan ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Dampak Simulasi Peramalan Liberalisasi Perdagangan Beras di Dunia

Variable	Satuan	Mean Dasar	lib-rc-dn-st Simulasi 7	Perubahan	
				Unit	%
Beras					
--oduksi gabah di Jawa	(000 ton)	41066	40994	-72	-0.17533
³ roduksi Gabah di Luar Jawa	(000 ton)	18041	17935	-106	-0.58755
--oduksi Gabah Nasional	(000 ton)	59106	58929	-177	-0.29946
³ roduksi Beras Nasional	(000 ton)	35600	35493	-107	-0.30056
³ SUSUT	(000 ton)	3204	3194	-10	-0.31211
³ enawaran Beras Indonesia	(000 ton)	44694	41627	-3067	-6.86222
Harga Gabah di Jawa	(Rp/kg)	477.39	470.43	-6.96	-1.45793
Harga Gabah di Luar Jawa	(Rp/kg)	476.11	467.47	-8.64	-1.81471
Harga Gabah di Nasional	(Rp/kg)	571.91	562.5	-9.41	-1.64536
Harga Beras Domestik (eceran)	(Rp/kg)	1178.22	1105.91	-72.31	-6.13722
Marjin Pemasaran Beras	(Rp/kg)	228.68	171.98	-56.7	-24.7945
Permintaan Beras di Indonesia	(000 ton)	37913	38239	326	0.859863
Harga Impor Beras di Indonesia	(US\$/kg)	0.42155	0.36199	-0.05956	-14.1288
HMBII	(Rp/kg)	803.24	689.75174	-113.488	-14.1288
Impor Beras Indonesia	(000 ton)	9363	9396	33	0.352451
I-npor Beras Dunia	(000 ton)	37908	37951	43	0.113433
E<spor Beras Dunia	(000 ton)	29838	31050	1212	4.061934
Harga Beras Dunia	(US\$/kg)	0.52919	0.36199	-0.1672	-31.5955
Konsumen Beras	(000 Rp)		2753275.6		
Produsen Jawa	(000 Rp)		-285568.8		
--odusen Luar Jawa	(000 Rp)		-155416.32		
otal Produsen Padi	(000 Rp)		-440985.12		
^embaga Pemasaran	(000 Rp)		173898.9		
-enerimaan Pemerintah	(000 Rp)		-1529756.9		
Total Surplus Beras	(000 Rp)		956432.47		

Peramalan terhadap scenario kebijakan pemerintah yang mempertahankan intervensinya kedalam perdagangan beras di Indonesia ternyata masih mengakibatkan penurunan surplus produsen,

hanya saja penurunan surplus ini lebih kecil dibandingkan apabila tidak ada intervensi pemerintah. Hasil simulasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perubahan Surplus Akibat Penerapan Liberalisasi Perdagangan Dunia

Perubahan Surplus	Simulasi 1	Simulasi 2	Simulasi 3	Simulasi 4
Konsumen beras (000 Rp)	2716579.9	2753275.6	1661417	-11416207
Produsen Jawa (000 Rp)	-281879.5	-285568.8	-159025	14605580
Produsen Luar Jawa (000 Rp)	-153446.1	-155416.3	-85965	829134
Total Produsen Padi (000 Rp)	-435325.7	-440985.1	-244990	2289714
Lembaga pemasaran (000 Rp)	172574.9	173898.9	64125	3122231
Penerimaan Pemerintah (000 Rp)	-1529757	-1529756.9	-1529757	-2323006
Total Surplus Beras (000 Rp)	924072.22	956432.47	-49304	-8327269

Simulasi 1 : liberalisasi beras di Indonesia

Simulasi 2 : liberalisasi beras di Dunia

Simulasi 3 : liberalisasi beras di Dunia dengan kebijakan di Indonesia

Simulasi 4 : liberalisasi sesuai aturan WTO dengan kebijakan di Indonesia

Kebijakan Pemerintah Indonesia : penurunan 10% harga pupuk, peningkatan produktivitas 25% dan peningkatan harga gabah 25%

REKOMENDASI

Kebijakan pemerintah berkaitan dengan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga seyogyanya tidak lagi berupa pangan murah yang dampaknya menurunkan kesejahteraan petani, tetapi lebih sesuai apabila kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan daya beli. Oleh karenanya kebijakan pemerintah lebih sesuai jika berorientasi pada "penyehatan" produsen yang dampaknya akan meningkatkan daya beli sehingga mampu mencukupi kebutuhan pangan keluarganya. Salah satu intervensi pemerintah adalah kebijakan penerapan tarif impor untuk pangan utamanya komoditas beras. Hasil evaluasi kebijakan domestik menunjukkan bahwa penghapusan intervensi pemerintah melalui penghapusan tarif impor menguntungkan konsumen tetapi merugikan produsen. Mendasarkan pada hasil tersebut maka kebijakan penerapan tarif impor masih diperlukan, utamanya untuk menyiapkan produsen menuju pemberlakuan perjanjian internasional *Agreement on Agriculture* (AOA) sampai pada batas waktu yang ditentukan. Guna mendukung kebijakan tersebut diperlukan adanya lembaga yang berperan sebagai *buffer stock* guna stabilisasi harga.

Hasil evaluasi kebijakan domestik, pelepasan pengendalian tataniaga beras berdampak menurunkan kesejahteraan produsen beras akan tetapi menguntungkan kesejahteraan produsen tebu. Hasil tersebut memberikan pertimbangan kepada pemerintah Indonesia agar tidak terburu-buru menerapkan kebijakan bebas bea masuk untuk komoditas beras. Tidak satupun negara yang membebaskan pangan dari intervensi pemerintah apakah berupa tarif impor, subsidi ataupun pajak ekspor. Oleh karenanya apabila Indonesia lebih awal menerapkan liberalisasi perdagangan dengan tarif impor nol persen ibarat "pahlawan kesiangan" yang justru akan merugikan produsen dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, K. dan R. Tyers. 1990. How Developing Countries Could Gain from Agricultural Trade Liberalization in the Uruguay Round. Dalam Goldin, I. Dan Knudsen. 1990. *Agricultural Trade Liberalization: Implication For developing Countries*. Organization for Economic Department, The World Bank.
- Amang, B. 1993. *Kebijaksanaan Pemasaran Gula di Indonesia*. PT Dharma Karsa Utama, Jakarta.
- Amang, B dan Husein Sawit, 2000. *Kebijakan Beras dan pangan nasio-nal Pelajaran dari Orde baru dan era Reformasi*. IPB Press, Bogor.
- Zerartemen Pertanian RI. 2000. *Politik Perberasan*

Haruskah Monopoli Impor Dikembalikan Kepada Bulog ? Jakarta.

- Erwtdodo, dkk, 1996. *Ketahanan pangan Era Pasar bebas*. Puslit Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Deptan RI.
- FAO (Food and Agricultural Policy of United Nations). *FAOSTAT Data Base Tahun* 2003.
- Hanani, N., 2000. *Model Mikro-Makro-ekonomi Indonesia: Analisis Simulasi Kebijakan Menghadapai Era Liberalisasi Perdagangan*. Desertasi, IPB, Bogor.
- Irewati, A. 1996. *Ekonomi Politik dari Kerjasama Ekonomi Asean Sepuluh*. Analisis CSIS.
- Kartadjoemena, H.S. 2000. *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanis-me penyelesaian Sengketa, Sistem, Kelembagaan, prosedur Implemen-tasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*, UI Press, Jakarta.
- Khudori, 2001. Kartel Pangan Dunia dan Kelaparan. *Kompas*, 19 Oktober 2001, Jakarta.
- Levy, P.I. 1997. A Political-Economic Analysis of Free Trade Agreements. *777e American Economic Review*, September 1997.
- Pelitasari, L. 2000. Telaah Kebijakan Swasembada Beras Sebagai Kebijakan Publik. *Warta Intra Bulog*, Desember 2000.
- Ratnawati, A. 1996. *Dampak Kebijakan Tarif Impor dan Pajak Ekspor Terhadap Kinerja perekonomian, Sektor Pertanian dan Distribusi Pendapatan di Indonesia: Suatu Pendekatan Model Keseimbangan Umum*. Disertasi (tidak dipublikasikan). Program pasca sarjana IPB. Bogor.
- Sadoulet, E dan Janvry, A.D. 1992. Agricultural Trade Liberalization and The Low Income Countries: A General Equilibrium-Multimarket Approach. *American Journal of Agricultural Economics*, Volume 74, No. 2, May 1992.
- Simatupang P., 1999. Toward Sustainable Food Security: the Need For A New Paradigm. Makalah Seminar pa-da *International Seminar on Agriculture Sector During The Turbulence of Economic Crisis: Lesson and Future Directions*. PSE Balitbang Pertanian. 17-18 Februari 1999. Bogor.
- Stepenson, S. and Erwidodo. 1995. The Impact of The Uruguay Round on Indonesia's Agricultural Sector. Paper Presented at the ISEI-World Bank Conference on Economic Deregulation: "Building on Success: Maximizing the Gains from Deregulation". Jakarta.
- Tanner, C. 1996. Agricultural Trade Liberalization and The Uruguay Round. *Australian Journal of Agricultural Economics*. Vol 40. No.1 (April 1996).